

Sistem Pencatatan Dan Pembukuan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Desa Majannang

Sarnawiah*¹ dan Syamsul Bakhtiar Ass²

^{1,2}Universitas Muslim Maros

sarnawiah@umma.ac.id¹, stim.assagaf@yahoo.com²

ABSTRAK

Info Artikel

Riwayat artikel

Dikirim: Oktober 07, 2023

Direvisi: Oktober 11, 2023

Diterima: Oktober 19, 2023

Corresponding Author:

Author Name*:

sarnawiah

Email*:

sarnawiah@umma.ac.id

Hp*: 085340065469

Kata Kunci:

Pencatatan

Pembukuan

Laporan Keuangan

BUMDesa

ABSTRAK

Tujuan Pengabdian ini dilakukan pada Desa Majannang Kec. Maros Baru adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Desa Majannang, terutama dalam pencatatan dan penyusunan pembukuan laporan keuangan BUMDes, selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk memastikan penyusunan dokumen laporan keuangan BUMDes sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan regulasi pemerintah. Metode yang digunakan berupa; pemaparan/ceramah; metode ini bertujuan untuk menjelaskan tentang pengertian, fungsi, siklus, jenis, dan prinsip akuntansi serta pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan pelaporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK); metode diskusi/tanya jawab; metode ini bertujuan untuk mengkaji tentang pemahaman manajemen keuangan dan penyusunan dokumen laporan keuangan peserta/pengelola BUMDesa yang mengikuti kegiatan; dan metode kasus/ccontoh; metode ini memberikan beberapa gambaran kasus/ccontoh yang berkaitan dengan laporan keuangan organisasi (BUMDes), serta cara penyelesaiannya. *Output* yang diperoleh pemahaman hasil sosialisasi sistem pencatatan dan pembukuan laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Desa Majannang dapat terlihat dengan adanya interaksi dari para peserta khususnya pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), berupa keaktifan dalam sesi tanya jawab.

ABSTRACT

The purpose of this service carried out in Majannang Village, Maros Baru District is to increase awareness and understanding of the management of Village-Owned Enterprises (BUMDesa) Majannang Village, especially in recording and preparing the bookkeeping of BUMDes financial statements, in addition, this activity is also intended to ensure the preparation of BUMDes financial statement documents in accordance with applicable financial accounting standards and government regulations. The methods used are; presentations/lectures; This method aims to explain the meaning, functions, cycles, types, and principles of accounting as well as recognition, measurement, financial disclosure and reporting based on Financial Accounting Standards (SAK); discussion/question and answer method; This method aims to examine the understanding of financial management and the preparation of financial statement documents for BUMDesa participants/managers who participate in activities; and case/example methods; This method provides some

overview of cases/examples related to the financial statements of organizations (BUMDes), as well as how to solve them. The output obtained by understanding the results of socialization of the system of recording and bookkeeping financial statements of Village-Owned Enterprises (BUMDesa) of Majenang Village can be seen by the interaction of the participants, especially managers of Village-Owned Enterprises (BUMDesa), in the form of activeness in the question and answer session.

PENDAHULUAN

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 pasal 26 menyatakan bahwa alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana. Pada awal pendirian BUM Desa, pembukuan mungkin dapat dilakukan secara sederhana dengan hanya menyelenggarakan buku penerimaan dan pengeluaran kas, namun seiring dengan perkembangannya dimana transaksi harian yang semakin meningkat, maka diperlukan suatu petunjuk teknis penyusunan laporan keuangan BUM Desa. Atas dasar tersebut Deputi Bidang Akuntan Negara menyusun petunjuk teknis penyusunan laporan keuangan BUM Desa berdasarkan standar akuntansi yang berlaku dan peraturan perundang-undangan yang merupakan seri pertama Pedoman Asistensi Tata Kelola Keuangan dan Kinerja BUM Desa. Sampai saat ini belum ada standar akuntansi yang mengatur secara khusus tentang akuntansi BUM Desa. Oleh karena itu pedoman ini disusun dengan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Peraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor: 4 Tahun 2015

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah instansi besar maupun kecil yang dapat memberikan gambaran kondisi keuangan instansi/perusahaan tersebut. Akuntansi pada mulanya merupakan sarana komunikasi interen sebuah industri yang kemudian berkembang menjadi sarana komunikasi antar industri. Sarana komunikasi dalam akuntansi yaitu laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Namun berdasarkan hasil penelitian masih banyak institusi khususnya institusi non pemerintah menyusun laporan keuangan tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Pradhana, 2020).

Peraturan Pemerintah 72/2005, menjelaskan bahwa desa merupakan suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasannya, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Di Indonesia, peraturan yang berkaitan dengan desa diatur di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 4, pada undang-undang tersebut menyebutkan ada 9 (sembilan) tujuan pengaturan desa, salah satunya yang berbunyi "mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pembangunan

potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama". Tujuan inilah yang mendorong dilaksanakannya program Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Indonesia.

BUMDesa merupakan badan usaha milik desa yang didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDesa dibangun atas prakarsa dan partisipasi masyarakat. BUMDes juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan. BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi, modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luas, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain bahkan melalui pihak ketiga (Peraturan Pemerintah 72/2005 pasal 79).

Keberhasilan Desa dalam meningkatkan pendapatan Desa ditentukan oleh strategi BUMDesa dalam mengelola secara optimal aset-aset dan potensi yang dimiliki Desa (Berdirinya BUMDesa diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan yang terjadi di Desa dan sebagai media yang mengajarkan kemandirian dan tidak tergantung pada sumber keuangan eksternal lain serta dapat menjadi sarana pembelajaran entrepreneurship bagi masyarakat, termasuk dalam mengelola laporan keuangannya, tentu saja hal tersebut didukung pula oleh penyusunan pencatatan dan pembukuan pelaporan yang baik, karena laporan keuangan menjadi gambaran penting di dalam melihat posisi keuangan dan kinerja keuangan. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.

Menyusun laporan keuangan merupakan kewajiban bagi setiap perusahaan atau instansi dalam menjalankan kegiatan usahanya (Lintong, 2020). BUMDes merupakan unit usaha yang harus mempunyai laporan keuangan untuk mengetahui informasi mengenai perkembangan BUMDes mulai dari peningkatan penjualan, laporan keuntungan atau kerugian bisnis dan struktur kepemilikan BUMDes (Kartika Pradana Suryatimur et al., 2020). Peran penting penyusunan laporan keuangan adalah masyarakat dan pengurus BUMDes dapat melihat serta mengukur kinerja kepengurusan manajemen BUMDes serta dapat dijadikan acuan dalam merumuskan strategi pengembangan dan program kerja di periode berikutnya berdasarkan data-data aktual BUMDes (Sucahyawati, 2019). Untuk itu kebutuhan untuk melakukan proses pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang baik dan sesuai standar akuntansi yang berlaku menjadi sangat penting (Trimurti & Lomi, 2021).

METODE

Pengabdian ini menggunakan metode yang dapat menjamin bahwa peserta dapat mengimplementasi pengetahuannya setelah mengikuti/menghadiri lokakarya system pencatatan dan pembukuan laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Adapun metode yang digunakan antara lain:

- a) Metode Pemaparan/Ceramah; metode ini bertujuan untuk menjelaskan tentang pengertian, fungsi, siklus, jenis, dan prinsip akuntansi serta pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan pelaporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
- b) Metode Diskusi/Tanya jawab; metode ini bertujuan untuk mengkaji tentang pemahaman

manajemen keuangan dan penyusunan dokumen laporan keuangan peserta/pengelola BUMDesa yang mengikuti kegiatan.

- c) Metode Kasus/Contoh; metode ini memberikan beberapa gambaran kasus/contoh yang berkaitan dengan laporan keuangan organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta cara penyelesaiannya..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyusunan pencatatan dan pembukuan laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Desa Majannang, sampai saat ini masih menjadi hal yang umum ditanyakan oleh pengelola BUMDesa. Apalagi ketika menjelang akhir tahun, ketika penyusunan laporan pertanggungjawaban BUMDesa.

Pada prinsipnya, laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) memiliki fungsi yang sama dengan laporan keuangan organisasi atau perusahaan lain pada umumnya. Karena kita sangat pahami bahwa dalam suatu organisasi atau perusahaan keberadaan pelaporan keuangan sangat penting, seperti halnya pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Desa Majannang. Hal tersebut untuk mengetahui apakah dalam satu periode operasional berjalannya usaha mengalami peningkatan atau penurunan. Sehingga dapat melakukan evaluasi dari kinerja usaha yang telah berlangsung sebelumnya.

Dalam pelaksanaannya, penyusunan pencatatan dan pembukuan pelaporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebenarnya tidaklah rumit. Laporan keuangan ini pada dasarnya bisa dibuat dengan langkah-langkah yang mudah. Berikut tahapan yang dilakukan pada pencatatan dan pembukuan laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Desa Majannang :

Tabel 1. Tahapan Pencatatan dan Pembukuan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Desa Majannang

No	Tahapan	Deskripsi
1	Tahap 1 : Mencatat pendapatan dan penerimaan	Tahap ini, yang pertama harus dilakukan dalam penyusunan pencatatan dan pembukuan laporan keuangan BUMDes adalah dengan mencatat pendapatan dan penerima. Pada tahap ini, pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mencatat semua transaksi yang masuk dari hasil transaksi unit usaha BUMDes, dapat berupa hasil penjualan produk unit usaha dan pendapatan lainnya. Dalam mencatat pendapatan ini harus dilakukan secara terus menerus dan jangan sampai ada yang terlewatkan. Oleh sebab itu, penting untuk adanya karyawan atau pengurus BUMDes yang memang bertugas melakukan hal tersebut setiap harinya. Karena pencatatan pendapatan dan penerimaan BUMDes bisa digunakan untuk mengetahui berapa omset yang dihasilkan oleh BUMDes dalam suatu periode

2 Tahap 2: Mencatat pengeluaran	<p>Tahap kedua yang harus dilakukan dalam penyusunan pencatatan dan pembukuan laporan keuangan BUMDes adalah dengan mencatat pengeluaran BUMDes. Selain penting melakukan pencatatan pendapatan, mencatat pengeluaran juga harus dilakukan secara baik dan rutin, serta jangan sampai ada terlewat.</p> <p>Dengan melakukan pencatatan pengeluaran BUMDes, maka nantinya dapat hal tersebut dapat digunakan dalam menghitung seberapa besar biaya operasional BUMDes. Sehingga ketika melakukan evaluasi, dapat diketahui dengan mudah angka pasti berapa biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMDes dalam satu periode/bulan/triwulan/semesteran atau tahunan.</p>
3 Tahap 3: Mencatat piutang dan hutang	<p>Tahap selanjutnya adalah dengan mencatat piutang dan hutang. Tahap ketiga ini , penyusunan pencatatan dan pembukuan laporan keuangan BUMDes, yaitu mencatat piutang dan hutang secara rinci. Pencatatan ini dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam sebuah periode. Hal tersebut berkaitan dengan beban keuangan yang dimiliki oleh BUMDes.</p> <p>Dengan adanya pencatatan piutang dan hutang yang rapi dan teratur, pengurus BUMDes dapat lebih mudah dalam mengambil keputusan keuangan.</p> <p>Pencatatan hutang dan piutang BUMDes juga dapat menjadi acuan bagi pemerintah desa atau ketua BUMDes dalam mengambil sebuah keputusan mengenai keuangan BUMDes.</p>
4 Tahap 4: Mencatat persediaan	<p>Tahap keempat dalam penyusunan pencatatan dan pembukuan laporan keuangan BUMDes adalah dengan mencatat persediaan yang ada. Kegiatan pencatatan ini dilakukan dengan cara mencatat persediaan barang untuk BUMDes.</p> <p>Contoh persediaan produk dari unit usaha BUMDes, yaitu persediaan alat tulis kantor dan kebutuhan bahan untuk operasional harian. Semua hal tersebut harus dicatat dengan baik dan teratur.</p> <p>Pencatatan ini akan memudahkan pengurus BUMDes dalam mengetahui bagaimana persediaan barang yang ada. Misalnya, barang yang digunakan</p>

		sebagai bahan baku dalam produksi unit usaha BUMDes. Hal tersebut juga dilakukan sebagai cara untuk menghindari terjadinya kesalahan perhitungan dalam operasional BUMDes. Pencatatan persediaan ini akan memudahkan pengurus BUMDes dalam mengatur keputusan pembelian barang.
5	Tahap 5: Mencatat aset tetap	Selanjutnya tahap 5 adalah mencatat aset tetap BUMDes. Langkah ini dilakukan dengan mencatat seluruh aset tetap yang menjadi milik BUMDes. Aset tetap tersebut bisa berupa gedung, tanah, kendaraan, mesin produksi dan lain sebagainya. Kegiatan mencatat aset tetap ini bisa digunakan untuk menarik investor dan mengetahui jumlah aset yang dimiliki oleh BUMDes saat ini. Aset tetap dapat menjadi nilai tawar BUMDes ketika ingin mengajukan pendanaan atau memutuskan penawaran kerjasama BUMDes. Karena hal tersebut, pengurus BUMDes perlu melakukan pencatatan rutin mengenai aset serta nilai aset yang BUMDes miliki.
6	Tahap 6: Mencatat penggajian, penyesuaian, tutup buku	Tahap keenam dalam menyusun pencatatan dan pembukuan laporan keuangan BUMDes adalah dengan mencatat penggajian (gaji karyawan BUMDes), penyesuaian, dan tutup buku. Langkah ini perlu dilakukan untuk mengetahui berapa jumlah uang yang digunakan untuk menggaji karyawan dan sebagai bagian dari laporan keuangan kepada pimpinan atau Pemerintah Desa. Pencatatan ini perlu dilakukan dalam periode bulan, atau tergantung dari pengeluaran untuk kebutuhan penggajian.
7	Tahap 7: Menyusun laporan	Tahap terakhir adalah dengan menyusun pencatatan dan pembukuan laporan dengan baik dan benar. Perlu diingat dalam pelaporan keuangan BUMDes, hal yang utama yang perlu diperhatikan adalah laporan keuangan yang baik dan benar serta dimusyawarahkan, tentunya dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Karena laporan keuangan tersebut bisa diterima oleh Pemerintah Desa lewat musyawarah desa, jika tidak ada yang merasa kecewa atau ragu dengan laporan keuangan yang diberikan.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini ditujukan untuk membantu BUMDes Desa Majannang dalam menyusun pencatatan dan pembukuan Laporan keuangan BUMDes. Dasar kegiatan ini adalah permintaan kebutuhan sosialisasi dan pendampingan dalam rangka memperbaiki penyusunan laporan keuangan dari BUMDesa Desa Majannang. Hasil lokakarya pada sesi diskusi menunjukkan beberapa kelemahan dalam pelaporan keuangan. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, tim pemateri menetapkan prioritas kegiatan yang segera dilaksanakan yaitu memberikan pemahaman konsep dasar laporan keuangan BUMDes, penyusunan dan pencatatan pembukuan, hingga kepada pelaporan pembukuan laporan keuangan BUMDes

SARAN

Mengingat bahwa kegiatan sosialisasi pencatatan dan pembukuan laporan keuangan BUMDesa Desa Majannang ini sangat penting bagi aparatur pemerintah desa dan pengelola BUMDes, maka kegiatan ini diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, seperti mengadakan kegiatan sosialisasi lanjutan, pelatihan dan pendampingan lanjutan guna meningkatkan kompetensi pengelola BUMDes dan mendukung program pemerintah desa agar tercapainya desa mandiri dan maju demi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, diharapkan pula bagi para pengelola BUMDes untuk meningkatkan kemampuan dalam teknologi pengoperasian komputer demi memudahkan penggunaan aplikasi laporan keuangan

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Kepala Desa Majannang, Staf Desa Majannang, dan Pengelola BUMDesa Desa Majannang yang telah membantu pelaksanaan PKM ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Kartika Pradana Suryatimur, Siti Afidatul Khotijah, & Panji Kusuma Prasetyanto. (2020). Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan pada BUMDes Desa Balesari. *Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI*, 4(2), 242-246. <https://doi.org/10.37859/jpumri.v4i2.2163>
- Lintong, J. S. (2020). Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP pada BUMDes "Kineauan" Desa Wawona Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, 16(1), 95-101. <https://doi.org/10.31940/jbk.v16i1.1597>
- Nasihin, I., Arimurti, T. 2022. Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Sugih Anugrah. *Jurnal Masyarakat Mandiri* 6 (1). <https://doi.org/10.31764/jmm.v6i1.6460>
- Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). 2016. Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP).
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 pasal 26
- Peraturan Pemerintah 72/2005 pasal 79

- Pradhana, R. (2020). Analisis Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Bontonompo Jaya Di Desa Bontonompo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto [Universitas Negeri Makassar]. <http://eprints.unm.ac.id/id/eprint/17696>
- Sasmita, E. Sokarina, A., Mariadi Y. 2022. Analisis laporan keuangan badan usaha milik desa Berdasarkan teori ekonomi politik. Jurnal Risma 2(1). <https://jurnal.fe.unram.ac.id/index.php/risma/article/download/181/141>
- Sucahyawati, A. H. K. (2019). Dimensi Kreativitas dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Jurnal Hummansi, 2(1), 25-36. <https://journal.stikomiyos.ac.id/index.php/jurnal-hummansi/index> 25
- Trimurti, A., & Lomi, L. (2021). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Keuangan Bumdes (Studi Kasus BUMDes INA HUK). 9(1), 62-72.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 4